TUAN YANG BAIK DAN PATIH YANG BAIK

Madjenang, Tahun 1831 — Sebuah Kunjungan Yang Tak Lazim

Pada tahun 1830-an, tak lama setelah diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch—dalam lidah rakyat disebut Van Den Bosch—menghadapi persoalan pelik di Pulau Jawa: bagaimana memperkuat jalur logistik dan pengawasan di pesisir selatan yang selama ini rawan. Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir itu sering menjadi sasaran serangan bajak laut, dan banyak desa-desa yang dahulu hidup dari perdagangan laut akhirnya hancur atau ditinggalkan.

Salah satu tempat yang menarik perhatian Van den Bosch adalah sebuah lokasi di muara Sungai Donan, di mana dahulu pernah berdiri sebuah desa bernama Cilacap. Namun pada masa itu, Cilacap sudah lama bubar—ditinggalkan warganya akibat serangan-serangan laut yang berulang dan tidak adanya perlindungan dari kekuatan-kekuatan besar. Kini, Van den Bosch bermaksud membangkitkan kembali tempat itu, menjadikannya pelabuhan strategis yang baru di pesisir selatan Jawa.

Untuk merintis proyek besar ini, Van den Bosch harus lebih dulu melakukan perjalanan darat ke wilayah yang menjadi gerbang ke selatan, yaitu Kabupaten Dayaluhur. Dalam administrasi Hindia Belanda, daerah ini dikenal sebagai Patehschap Dayaluhur, dipimpin bukan oleh seorang bupati, melainkan oleh seorang Patih — jabatan setara Sekretaris Daerah dalam istilah modern — yang bernama Krama Yuda.

Ibu kota Patehschap Dayaluhur waktu itu terletak di Madjenang, sebuah kota kecil di kaki Gunung Cendana, jauh di hulu, perlu perahu menghilir Cikawung dan Citanduy untuk sampai jauh ke laut, tetapi penting sebagai pusat pemerintahan daerah pegunungan selatan. Jalan-jalan menuju ke sana masih berupa tanah berbatu melewati pegunungan, dan perjalanan dari pesisir utara Jawa ke Madjenang, juga memakan waktu berhari-hari.

Maka sebelum meninjau langsung lokasi yang direncanakan untuk pelabuhan baru, Van den Bosch memilih bermalam di Madjenang, di rumah resmi Patih Krama Yuda. Ini bukan kunjungan sembarangan: dalam tradisi pemerintahan Jawa dan Hindia Belanda waktu itu, setiap

kunjungan pejabat tinggi adalah peristiwa kenegaraan, lengkap dengan jamuan, upacara adat, dan segala penghormatan yang wajib diberikan.

Namun malam itu, di bawah langit Madjenang yang berselimut kabut tipis, akan terjadi sesuatu yang tak sepenuhnya bisaa: sebuah dialog kecil di balik pendapa yang akan mengubah nasib Dayaluhur — sebuah wilayah kecil yang selama ini hidup di persimpangan kekuasaan antara istana raja-raja Mataram dan pemerintahan kolonial Batavia.

Malam sudah turun di dataran tinggi Madjenang. Angin dari pegunungan Dayaluhur bertiup sejuk, membawa bau tanah basah dan harum kayu bakar dari dapur para abdi. Di halaman pendapa utama, obor-obor damar menyala terang, menandai jamuan kenegaraan yang baru saja usai. Gamelan sudah lama berhenti berbunyi, penari-penari muda telah kembali ke bangsal mereka, dan para tamu dari kalangan priyayi pribumi pun perlahan meninggalkan tempat.

Van Den Bosch di Madjenang 2 Agustus 1831

Di ruang dalam pendapa, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch—yang oleh lidah rakyat disebut Van Den Bosch—baru saja menyelesaikan pertemuan resmi dengan Patih Krama Yudha Dayalukur. Kunjungan itu sendiri adalah bagian dari rencana besar pemerintahan

Hindia Belanda untuk memperluas pengaruh dan pengawasan atas wilayah selatan Jawa bagian tengah. Pelabuhan baru direncanakan akan dibangun di wilayah pantai selatan, di muara Sungai Donan, yang kemudian hari dikenal sebagai Cilacap.

Madjenang, yang secara strategis terletak di antara pegunungan dan jalur perdagangan pedalaman, menjadi tempat persinggahan penting. Dan malam itu, sang Patih telah menyiapkan semua bentuk penghormatan menurut adat Jawa—termasuk satu hal yang dianggap puncak kesantunan: persembahan seorang gadis muda untuk menemani sang Gubernur selama bermalam.

Namun yang tak terduga, Van Den Bosch dengan tenang dan sopan menolak persembahan tersebut. Penolakan itu dilakukan secara langsung namun halus, cukup untuk dimengerti tanpa membuat keributan, tetapi cukup jelas hingga membekas di benak para pejabat pribumi. Dalam adat yang selama ini mengenal persembahan perempuan sebagai bagian dari diplomasi halus, penolakan itu bukan saja mengejutkan, tetapi juga memalukan bagi sang tuan rumah.

Tak lama setelah peristiwa itu, di ruang kecil di balik pendapa, Patih Krama Yudha berbicara kepada Hendrik van der Meer, juru tulis muda yang menyertai rombongan Gubernur Jenderal. Hendrik dikenal fasih berbahasa Sunda halus dan sering menjadi perantara dalam percakapan informal antara pihak Belanda dan bangsawan pribumi.

Dan di sinilah, dalam ruangan tenang dengan lampu minyak menyala remang, berlangsung percakapan yang akan membuka satu sisi sejarah—yang barangkali tak pernah masuk arsip resmi—tetapi menyimpan suara-suara kecil dari tepi kekuasaan.

Pagi itu, di balik pendapa yang sepi, Juru Tulis Gubernur Jenderal, Hendrik van der Meer, duduk bersila di atas kursi, tangannya memegang pena bulu dan kertas kasar.

Di hadapannya, Patih Krama Yuda Dayaluhur, masih mengenakan kain lurik dan ikat kepala, duduk dengan gelisah, menunduk sesekali.

Patih Krama Yuda (dengan bahasa Sunda halus)

"Hapunten, Tuan Hendrik... Abdi hampura parantos ngaganggu reureuh Tuan. Tapi aya saeutik kahariwang dina hate abdi. Mugia teu janten kasalahan abdi nyarios sakedik."

(Hendrik, mengangguk perlahan, menjawab dalam Melayu sederhana.)

Hendrik

"Tiada apa, Paduka. Silakan. Beta dengar dengan hati terbuka."

Patih Krama Yuda (dengan suara rendah)

"Ngan... abdi hoyong nyarios saeutik ngeunaan sajamuan wengi kamari. Abdi raos isin pisan, Tuan. Anu abdi atur kalawan hormat... henteu sami sareng kahoyong Tuan Gubernur Jenderal."

(Saya ingin bicara sedikit tentang jamuan malam tadi. Saya merasa sangat malu, Tuan. Apa yang saya aturkan dengan hormat... ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuan Gubernur Jenderal.)

Hendrik (mengangguk pelan)

"Beta dengar. Beta tahu semalam sambutan Paduka amat baik. Tiada kurang satu apa pun."

Patih Krama Yuda

"Tapi... abdi terang, waktos tamu agung sumping ka bumi kami, salah sahiji tanda pangajén teh... nyaeta persembahan anu paling lemes, anu panggeulisna. Salah sahiji putri anu asalna ti kulawarga terhormat."

(Hendrik sedikit menunduk hormat.)

Hendrik

"Beta faham. Tetapi Gubernur Jenderal... memilih untuk tidak menerima. Karena beliau memandang penghormatan itu bukan dari badan, tetapi dari ikhlas hati."

Patih Krama Yuda (tersenyum getir, berbicara lebih pelan)

"Di tanah kami, Tuan, geus lila pisan adat kitu. Raja-raja ti yogyakarta, ti Surakarta, sakali datang... pasti nampi persembahan kitu. Malah...

mindeng ditaroskeun heula samemeh datang. awewe anu ngora, anu masih murni, umur teu langkung ti genep belas taun."

(Di tanah kami, Tuan, sudah lama adat itu. Raja-raja dari Yogyakarta, dari Surakarta, setiap datang... pasti menerima persembahan begitu. Bahkan... sering ditanyakan lebih dulu sebelum berangkat. Gadis yang muda, masih murni, tidak lebih dari enam belas tahun.)

Hendrik (diam, mencatat perlahan)

Patih Krama Yuda (melanjutkan dengan lirih)

"Lamun Raja ngaraos suka, kadang gadis teh diboyong ka Karaton. Jadi abdi... sadayana jalma di Dayaluhur... teu tiasa nolak. Éta dianggap kahormatan."

(Jika Raja berkenan, kadang gadis itu dibawa ke Keraton. Maka kami... semua orang Dayaluhur... tidak bisa menolak. Itu dianggap kehormatan.)

Hendrik (bertanya perlahan)

"Itu kahendak yang tertulis, Paduka?"

Patih Krama Yuda

"Henteu. Teu aya surat. Tapi sagalana kawas hukum anu teu katingali. Sarerea terang."

(Tidak. Tak ada surat. Tapi semua orang tahu itu hukum yang tak tertulis.)

(Hendrik mencatat cepat.)

Patih Krama Yuda (menghela napas panjang)

"Teu ngan ukur gadis, Tuan. Jejaka oge kadang dipenta. Anu gagah, anu pinter nyarita. Pikeun ngurus kuda, pikeun ngadamel taman, atanapi ngan ukur pikeun ngarayakeun di karaton."

(Bukan hanya gadis, Tuan. Jejaka pun kadang diminta. Yang gagah, yang pandai berbicara. Untuk mengurus kuda, untuk membangun taman, atau hanya untuk menghibur di istana.)

Hendrik (mengangkat kepala, bertanya hati-hati)

"Paduka tak pernah bicara tentang ini kepada Residen?"

Patih Krama Yuda (tersenyum pahit)

"Ka saha abdi badé nyarios, Tuan? Residen oge sering ngadahar jeung nginum di istana Solo. Lamun abdi ngadu... meureun abdi moal uih deui ka bumi."

(Kepada siapa saya harus berbicara, Tuan? Residen pun sering makan minum di istana Solo. Jika saya mengadu... mungkin saya tak akan pulang ke rumah.)

(Saat itu, udara pendapa terasa berat. Angin kecil dari hutan belakang membawa bau kayu basah.)

Hendrik (dengan suara sangat lembut)

"Apa yang buat Paduka berani bicara sekarang?"

Patih Krama Yuda (menatap Hendrik dengan mata berat)

"Sebab Tuan... sanés sakumaha tamu bisaa. Tuan henteu ngahina kami sanajan nolak adat kami. Tuan parantos nyalametkeun hiji kahormatan. Maka abdi ngaraos... meureun ayeuna, kalawan pitulung Tuan, sora abdi tiasa anjog ka Batavia, sanés deui ka Solo."

(Sebab Tuan... bukan seperti tamu bisaanya. Tuan tidak menghina kami meskipun menolak adat kami. Tuan telah menyelamatkan sebuah kehormatan. Maka saya merasa... mungkin kali ini, dengan bantuan Tuan, suara kami bisa sampai ke Batavia, bukan lagi ke Solo.)

Keesokan harinya, pagi di Madjenang datang dengan kabut tipis. Udara dingin pegunungan menggelayut di sela-sela pepohonan aren dan jati. Gubernur Jenderal Van den Bosch tidak berlama-lama tinggal di pendapa. Sesudah sarapan ringan bersama para pejabat pribumi, ia memulai tugas utamanya: meninjau langsung tanah-tanah yang kelak akan menjadi bagian dari proyek pelabuhan besar di pesisir selatan.

Dengan dikawal beberapa opsir Belanda, asisten residen dari Banyumas, dan Patih Krama Yuda sendiri, Van den Bosch bergerak menuju selatan.

Perjalanan itu berat — jalan tanah becek, jembatan bambu reyot, dan sungai-sungai kecil yang harus diseberangi dengan perahu getek. Tetapi bagi Van den Bosch, semua itu bagian dari pekerjaan membangun masa depan.

Selama beberapa hari, rombongan kecil itu menyusuri:

Lembah Sungai Donan yang masih liar, Hamparan rawa-rawa air payau di dekat pantai, Jejak-jejak lama dari sebuah desa bernama Chelatjap yang sudah lama hancur oleh pembakaran dari bajak laut dua puluh tahun lalu— hanya sisa pondasi batu dan pohon-pohon kelapa liar yang tumbuh tanpa tuan.

Van den Bosch berhenti di beberapa titik, mengamati arah sungai, ketinggian tanah, dan arah angin. Ia berdiskusi serius dengan para opsir teknik tentang kemungkinan membangun dermaga, benteng pertahanan, dan jalan penghubung menuju Banyumas di utara.

Di sela-sela perjalanan, ia juga mengadakan pertemuan kecil dengan para lurah, demang, dan para kepala desa setempat. Membahas pengadaan tenaga kerja, kebutuhan bahan bangunan, dan keamanan jalur transportasi.

Semua dicatat, semua ditimbang dengan cermat.

Hari-hari di Dayaluhur penuh kerja keras, penuh perhitungan. Tidak ada yang tergesa.

Kepulangan ke Batavia atau Bogor

Setelah hampir satu minggu di Daerah Dayaluhur, Van den Bosch akhirnya kembali ke utara. Rombongan bergerak lambat ke arah Banyumas, lalu melanjutkan perjalanan darat menuju Batavia — atau mungkin singgah terlebih dahulu di Istana Bogor, tempat para Gubernur Jenderal bisaa beristirahat dari panas dan kesibukan pelabuhan.

Beberapa hari setelah tiba, di ruang pribadinya yang sejuk, beratap tinggi, Van den Bosch meminta laporan resmi dari semua staf yang mendampinginya selama perjalanan.

Hendrik van der Meer, juru tulis muda itu, datang membawa tumpukan catatan.

Dengan penuh rasa hormat, ia menyerahkan laporan yang mencatat:

Agenda perjalanan,

Hasil pengamatan lapangan,

Rencana teknis pelabuhan,

Dan di bagian akhir, catatan kecil tentang percakapan santai dengan Patih Krama Yuda.

Adegan: Membaca Laporan

Van den Bosch duduk di kursi kulit tuanya, membuka lembar demi lembar laporan itu.

Ia membaca tanpa banyak bicara, sesekali mengerutkan kening.

Ketika tiba di bagian obrolan dengan Patih — tentang adat persembahan gadis, tentang kerja paksa untuk istana Surakarta, tentang rasa malu seorang pejabat kecil dari pegunungan — Van den Bosch berhenti sejenak.

Ia menutup berkas itu perlahan.

Memandang ke luar jendela, ke arah kebun tropis yang basah oleh embun sore.

"Jadi begitu... mereka diperas, diam-diam, bukan hanya oleh hasil bumi... tetapi juga oleh kehormatan tubuh dan harga diri," gumamnya perlahan.

Hendrik berdiri di dekat pintu, menunduk sopan.

"Ya, Tuan. Bukan hanya pajak... tapi beban yang tak pernah tertulis," jawabnya pelan.

Van den Bosch bergeming cukup lama, seolah berbicara dengan dirinya sendiri.

"Patih itu... dia bicara apa adanya. Tidak meminta tolong. Tapi kebenaran itu berbicara sendiri."

Ia bangkit dari kursinya.

Menuju meja kerjanya.

Mengambil pena besar bertangkai bulu, mencelupkannya ke dalam tinta.

Lalu, tanpa banyak ragu, ia mulai menulis: sebuah keputusan baru — keputusan yang akan memisahkan Dayaluhur dari tekanan Surakarta, melindungi martabat rakyatnya, dan memberi mereka ruang untuk memilih jalannya sendiri.

Sebuah keputusan kecil di atas kertas —

Tapi besar artinya bagi tanah kecil di kaki gunung, yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan orang jauh.

Di ruang kerjanya yang luas — apakah di Batavia atau di Istana Bogor — Van den Bosch menyandarkan punggungnya pada kursi kayu berat. Laporan perjalanan dari Dayaluhur sudah dibaca, diteliti perlahan.

Di hadapannya, Hendrik van der Meer berdiri dengan tenang, menunggu.

"Beta ingin lihat juga laporan dari Residen Banyumas," kata Van den Bosch perlahan.

Hendrik mengangguk, menyerahkan berkas lain — laporan dari Residen J.E. de Sturler.

Van den Bosch membuka halaman-halamannya:

Ia membaca bagaimana, pasca Perang Diponegoro, Dayaluhur tinggal bayang-bayang.

Bagaimana kabupaten itu hanya berpenduduk 34.396 jiwa.

Bagaimana mereka hanya mampu membayar pajak pendapatan sebesar 85 sen setahun — hampir tidak berarti.

Bagaimana bekas luka serangan bajak laut dan kerja paksa kerajaan masih membekas dalam tubuh rakyatnya.

Bagaimana banyak orang meninggalkan tanah mereka sendiri, lari dari beban yang tak sanggup mereka tanggung.

Tangan Van den Bosch mengetuk-ngetuk pelan meja kerjanya.

Ia diam lama.

Pikirannya berjalan jauh — bukan hanya tentang pelabuhan baru, bukan hanya tentang cukai atau hasil bumi — tetapi tentang nasib manusia yang seolah terjepit antara dua kekuasaan, tak punya tempat untuk sekadar hidup dengan damai.

"Mereka," gumamnya perlahan, "diperas... oleh orang asing... dan oleh orang sebangsa sendiri."

Hendrik tidak berkata apa-apa. Ia tahu saat itu bukan saat untuk menyela.

Van den Bosch menarik napas panjang.

"Kalau kita paksa Dayaluhur ikut sistem tanam paksa penuh... mereka akan hancur sepenuhnya. Bukan hanya ladang mereka, tapi juga harga diri mereka."

Ia memejamkan mata sejenak, seperti berbicara dalam hati:

"Bila seorang Patih kecil saja masih bisa merasa malu karena kehormatan orang muda, bagaimana mungkin kita tega menambah penderitaan mereka atas nama negara?"

Ia membuka mata.

Mengambil pena besar dari meja.

Kini ia tahu, keputusan apa yang harus ia buat.

ISTANA BOGOR, 1831

Sore itu langit Bogor berat dan kelabu. Di ruang kerja yang dingin oleh angin pegunungan, Johannes van den Bosch duduk menghadap meja kayu besar.

Di hadapannya, bertumpuk laporan perjalanan:

Catatan survey lapangan di Dayaluhur,

Laporan resmi Residen Banyumas,

Dan catatan pribadi dari jurutulis muda, Hendrik van der Meer.

Semua telah ia baca.

Semua telah ia renungkan.

Gambaran tentang Dayaluhur membayang kuat di pikirannya:

Sebuah kabupaten besar tapi penduduknya jarang, miskin, tercerai-berai pasca perang,

Penduduk yang hidup di antara tanah gersang dan hutang adat yang tak pernah lunas,

Harga diri yang terkikis oleh kerja paksa dan persembahan yang tak pernah mereka kehendaki.

Di tengah dunia yang berubah cepat, Dayaluhur nyaris tidak punya tempat.

Van den Bosch membalik satu lembar kertas lagi: laporan pajak dari Residen Banyumas.

Hanya 85 sen per tahun — itu semua yang bisa dipungut dari seluruh penduduk Dayaluhur.

Terlalu kecil untuk dianggap pajak.

Tapi terlalu besar bila dihitung dari penderitaan yang harus mereka bayar.

Van den Bosch menyandarkan diri di kursinya.

Pandangan matanya kosong, menembus jendela ke taman hujan di luar.

Lalu perlahan ia menunduk, mengambil pena bulu.

Di atas lembaran kertas yang bersih, ia mulai menulis.

Besluit van den Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën

Gedaan te Buitenzorg, den 22sten Augustus 1831, No. 1

Gezien:

het rapport over de staat van het Pattehschap Dajaloehoer in de Residentie Banjoemas;

de waarnemingen gedurende het bezoek aan genoemde streek;

het verslag van de Resident van Banjoemas betreffende de economische en maatschappelijke omstandigheden aldaar;

Overwegende:

dat het Pattehschap Dajaloehoer aanzienlijke schade heeft geleden door vroegere krijgsverrichtingen en invallen van zeerovers;

dat de bevolking ernstig is verarmd en het onmogelijk wordt geacht de cultuurverplichtingen naar rato op te leggen zoals elders op Java;

dat de loyaliteit en eerlijkheid van de plaatselijke bestuurders erkenning verdienen;

dat de bescherming van de waardigheid van de ingezetenen moet worden gewaarborgd;

Besluit:

Artikel 1

Het Pattehschap Dajaloehoer wordt vrijgesteld van de verplichte deelname aan het cultuurstelsel, zoals dat elders in de Residentie Banjoemas en op Java van kracht is.

Artikel 2

De bevolking van Dajaloehoer mag vrijwillig deelnemen aan de verbouw van cultuurproducten (zoals koffie, suiker, indigo en peper) zonder enige dwang van het gouvernement.

Artikel 3

Voor de cultuurproducten die vrijwillig aan het gouvernement worden geleverd, zal een betaling worden verstrekt die tweemaal het standaardtarief bedraagt dat elders op Java wordt gehanteerd.

Artikel 4

Met betrekking tot peper is het de bevolking toegestaan deze vrij te verkopen aan derden, dan wel aan het gouvernement tegen een verhoogde vaste prijs van f10.- koper per pikol, in plaats van de tot nu toe verplichte prijs van f6.- koper.

Artikel 5

Alle vormen van verplichte afgifte van personen, hetzij mannelijke, hetzij vrouwelijke ingezetenen, aan externe machten buiten het gouvernement, zijn verboden en zullen als schending van de eer en rechten van het Pattehschap Dajaloehoer worden beschouwd.

Artikel 6

Deze bepalingen treden in werking op de datum van publicatie en blijven van kracht totdat nadere regeling wordt getroffen.

Gedaan te Buitenzorg, den 22sten Augustus 1831.

De Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische,

J. van den Bosch

Terjemahan Resmi ke Bahasa Indonesia

Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Ditetapkan di Buitenzorg (Bogor), tanggal 22 Agustus 1831, No. 1

Menimbang:

Laporan tentang keadaan Kabupaten Dayaluhur di Karesidenan Banyumas;

Pengamatan selama kunjungan langsung ke wilayah tersebut;

Laporan Residen Banyumas mengenai kondisi ekonomi dan sosial di Dayaluhur;

Mempertimbangkan:

Bahwa Dayaluhur mengalami kerusakan besar akibat perang dan serangan bajak laut di masa lalu;

Bahwa rakyat Dayaluhur hidup dalam kemiskinan berat sehingga tidak mungkin diberlakukan sistem tanam paksa penuh seperti di daerah lain;

Bahwa kesetiaan dan kejujuran para pemimpin pribumi layak mendapat pengakuan;

Bahwa perlindungan terhadap kehormatan penduduk perlu dijamin;

Memutuskan:

Pasal 1

Kabupaten Dayaluhur dibebaskan dari kewajiban mengikuti Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) sebagaimana berlaku di wilayah lain di Banyumas dan Jawa.

Pasal 2

Penduduk Dayaluhur boleh secara sukarela menanam komoditas pemerintah (kopi, tebu, nila, lada) tanpa paksaan.

Pasal 3

Hasil tanaman yang secara sukarela diserahkan kepada pemerintah akan dibayar dengan harga dua kali lipat dari tarif standar yang berlaku di daerah lain.

Pasal 4

Untuk tanaman lada, penduduk diberi hak penuh untuk menjual kepada pihak mana pun, atau kepada pemerintah dengan harga tetap f10 per pikol, menggantikan harga wajib sebelumnya f6.

Pasal 5

Segala bentuk penyerahan wajib manusia — baik laki-laki maupun perempuan — kepada kekuasaan di luar pemerintah dilarang, dan akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan Dayaluhur.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan berlaku hingga ada ketentuan baru.

Ditetapkan di Buitenzorg, 22 Agustus 1831.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

J. van den Bosch

…

Pena berhenti.

Van den Bosch membaca kembali keputusan itu dengan mata tajam.

Tak ada kata yang perlu diubah.

Tak ada maksud yang perlu diperhalus.

Ia tahu, keputusan ini hanya akan menjadi catatan kecil dalam buku-buku besar Batavia.

Tetapi bagi orang-orang kecil di kaki gunung itu, keputusan ini adalah ruang napas.

Adalah sedikit tempat berdiri, di tengah dunia yang tak ramah.

Van den Bosch meletakkan surat keputusan itu di baki khusus, untuk segera dikirim ke Batavia.

Sementara di luar sana, hujan mulai turun perlahan, membasahi bumi yang kehausan.

Dan Dayaluhur, untuk sejenak, mendapat hak untuk memilih jalannya sendiri.

MADJENANG, AKHIR 1831

Beberapa bulan setelah Van den Bosch menandatangani surat keputusannya di Buitenzorg, sebuah rombongan kecil berkuda membawa naskah tebal bersegel resmi tiba di Madjenang.

Surat itu, dengan cap pemerintah Hindia Belanda yang berkilau, diserahkan langsung kepada Patih Krama Yuda oleh seorang pejabat dari Karesidenan Banyumas.

Di pendapa Madjenang yang sederhana, di hadapan para lurah dan wadana dari seluruh wilayah Dayaluhur — dari Kewadanaan Madjenang, Daya Luhur, Pegadingan, Jeroeklegi hingga Nusa Kambangan — surat itu dibacakan dengan khidmat.

Isinya mengejutkan banyak orang:

Dayaluhur dibebaskan dari tanam paksa wajib.

Penanaman hasil bumi menjadi sukarela.

Harga hasil panen dibayar dua kali lipat jika diserahkan ke pemerintah.

Lada, yang menjadi hasil utama di tanah pegunungan, boleh dijual bebas dengan harga tinggi.

Semua bentuk penyerahan wajib manusia untuk adat kerajaan dihentikan dan dilindungi.

Sejenak, suasana di pendapa hening.

Lalu bisik-bisik kecil mulai mengalir.

Sebagian besar lurah dan wedana menunduk penuh rasa syukur — ada yang meneteskan air mata.

Bagi mereka yang bertahun-tahun terbisaa membungkuk pada beban tak terlihat, keputusan ini terasa seperti membuka ikatan tali dari leher.

Patih Krama Yuda sendiri mendengarkan dengan wajah tak bergeming.

Dalam hatinya, campur aduk rasa bangga, rasa syukur, dan rasa gamang.

Ia tahu, keputusan ini bukan hadiah. Ini adalah pengakuan — pengakuan atas derita panjang rakyatnya yang selama ini diam.

Selesai pembacaan, Patih bangkit perlahan.

Ia membungkuk dalam-dalam ke arah utusan residen.

"Hatur nuhun...," katanya lirih dalam bahasa Sunda, sebelum berbalik menghadap para bawahannya.

"Ieu lain hadiah," ujarnya pelan namun tegas, "ieu tanda yen urang Dayaluhur kudu ngajaga diri, kudu ngajaga kahormatan urang. Ulah ngahianat ka kasempetan ieu."

(Ini bukan hadiah. Ini tanda bahwa kita, orang Dayaluhur, harus menjaga diri, menjaga kehormatan kita. Jangan mengkhianati kesempatan ini.)

Para lurah dan wadana mengangguk-angguk.

Mereka tahu, perjuangan belum selesai. Yang lebih berat justru di depan.

Tapi di luar itu, diam-diam...

Di Banyumas, di Di Adjibarang, di pesisir utara, para pejabat kolonial lainnya, para kepala distrik dan para tuan tanah Belanda mendengar kabar tentang "keistimewaan Dayaluhur" ini dengan rasa getir.

"Mengapa Dayaluhur diberi kelonggaran?"

"Mengapa mereka dibebaskan dari tanam paksa, sementara daerah lain harus menyerahkan kopi, nila, dan tebu tanpa pilihan?"

Bahkan Residen Banyumas sendiri — yang bertugas memastikan target produksi dan setoran pajak tercapai — merasa terusik.

Bagi mereka, keputusan Van den Bosch dianggap menciptakan preseden buruk: bahwa daerah lain bisa menuntut perlakuan serupa, bahwa sistem bisa dilunakkan hanya karena belas kasihan.

Iri hati mulai merambat perlahan.

Kelak, rasa iri inilah yang akan menjadi bara diam-diam — menunggu saatnya untuk menyala.

Di Dayaluhur, di bawah sinar matahari yang keras di atas ladang-ladang kopi kecil, rakyat mulai bekerja dengan hati yang sedikit lebih ringan.

Mereka tahu mereka tak sepenuhnya bebas.

Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bekerja bukan karena paksaan.

Melainkan karena kehormatan mereka dipulihkan — walau mungkin hanya untuk sementara.

Penolakan Pencabutan 1835

BATAVIA, 1835

Tahun-tahun berlalu.

Dayaluhur tetap berjalan dengan status istimewanya — satu-satunya wilayah di Karesidenan Banyumas yang tidak wajib melaksanakan tanam paksa penuh.

Kopi, tebu, dan nila tumbuh di ladang-ladang kecil, tapi rakyat menanamnya atas kehendak sendiri.

Tidak ada paksa. Tidak ada cambuk.

Hanya janji harga yang lebih adil dari pemerintah.

Namun di balik ketenangan itu, suara-suara iri semakin keras terdengar di pesisir utara.

"Mengapa Dayaluhur dibebaskan?"

"Mengapa kita harus membanting tulang di ladang tanam paksa, sementara mereka bebas memilih?"

Para pejabat pribumi di Banyumas, para pengawas cultuurstelsel, bahkan beberapa residen, mulai mendorong pemerintah pusat untuk mencabut status istimewa itu.

Maka pada tanggal 22 April 1835, sebuah usulan resmi disampaikan ke Batavia.

Isinya:

Meminta agar status khusus Pattehschap Dayaluhur dicabut,

Meminta agar mereka diwajibkan mengikuti tanam paksa seperti daerah lain.

Tetapi Laporan Residen bertuliskan tanggal 5 September 1832 — laporan yaitu dari Residen J.E. de Sturler, masih menjadi dasar pertimbangan .

Surat Permohonan Residen Banyumas ke Batavia

Residentie Banjoemas, den 1sten Maart 1835

Aan den Weledelgestrenge Heer,

den Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën,

te Batavia.

Weledelgestrenge Heer,

Met verschuldigde eerbied neem ik de vrijheid Uwe Excellentie onder de aandacht te brengen de bijzondere status van het Pattehschap Dajaloehoer, sedert 1831 binnen deze residentie van kracht zijnde.

Overwegende de algemene tendens tot uniformiteit in de toepassing van het cultuurstelsel, meen ik eerbiediglijk te moeten voorstellen dat deze uitzonderlijke positie van Dajaloehoer aan een hernieuwde overweging wordt onderworpen.

Hoewel destijds terechte gronden bestonden voor de afwijkende behandeling, rijst thans de vraag of de economische en maatschappelijke omstandigheden inmiddels een wijziging rechtvaardigen.

Ik verzoek derhalve eerbiedig, dat Uwe Excellentie gelieve te overwegen of het voortbestaan van deze bijzondere status nog steeds in het belang van het Gouvernement is, of dat aanpassing wenselijk mocht blijken.

Met de meeste hoogachting,

Uw dienstwillige dienaar,

Resident van Banjoemas

Terjemahan Bahasa Indonesia

Karesidenan Banyumas, 1 Maret 1835

Kepada Yang Mulia,

Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

di Batavia.

Yang Mulia,

Dengan segala hormat, saya mengambil kebebasan untuk mengajukan perhatian Yang Mulia terhadap status istimewa Pattehschap Dayaluhur, yang telah berlaku di wilayah kami sejak tahun 1831.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan umum menuju keseragaman dalam penerapan sistem tanam paksa, saya dengan hormat mengusulkan agar status khusus Dayaluhur ditinjau kembali.

Meskipun dahulu ada alasan yang sah untuk pemberian perlakuan khusus, kini timbul pertanyaan apakah keadaan ekonomi dan sosial saat ini masih membenarkannya.

Karena itu, saya mohon dengan hormat agar Yang Mulia berkenan mempertimbangkan apakah kelanjutan status khusus tersebut masih sesuai dengan kepentingan Pemerintah, atau apakah perubahan perlu dilakukan.

Dengan penghormatan setinggi-tingginya,

Hamba Yang Setia,

Residen Banyumas

2. Besluit Pemerintah Pusat (Batavia)

Besluit van den Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën

Gedaan te Batavia, den 22sten April 1835, No. 2

Gezien:

Het verzoekschrift van den Resident van Banjoemas d.d. 1 Maart 1835, betreffende de heroverweging van de status van het Pattehschap Dajaloehoer;

Het rapport van den Resident van Banjoemas d.d. 5 September 1832, waarin de toestand van Dajaloehoer als economisch zwak wordt beschreven;

Overwegende:

Dat de economische en maatschappelijke omstandigheden in het Pattehschap Dajaloehoer nog niet voldoende verbeterd zijn om een gelijke behandeling als de overige afdeelingen te rechtvaardigen;

Besluit:

Artikel 1

De bestaande bijzondere status van het Pattehschap Dajaloehoer blijft gehandhaafd.

Artikel 2

De toestand van het Pattehschap zal echter nauwlettend worden gevolgd en binnen een passende termijn opnieuw worden geëvalueerd.

Artikel 3

Deze beschikking wordt medegedeeld aan den Resident van Banjoemas en treedt onmiddellijk in werking.

Gedaan te Batavia, den 22sten April 1835.

De Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische,

Jean Chrétien Baud

Terjemahan Bahasa Indonesia

Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Ditetapkan di Batavia, 22 April 1835, No. 2

Mengingat:

Surat permohonan dari Residen Banyumas bertanggal 1 Maret 1835, mengenai peninjauan kembali status Pattehschap Dayaluhur;

Laporan dari Residen Banyumas bertanggal 5 September 1832, yang menggambarkan keadaan ekonomi Dayaluhur masih lemah;

Mempertimbangkan:

Bahwa kondisi ekonomi dan sosial di Pattehschap Dayaluhur belum cukup membaik untuk membenarkan penyamarataan perlakuan dengan daerah lainnya;

Memutuskan:

Pasal 1

Status istimewa Pattehschap Dayaluhur tetap dipertahankan.

Pasal 2

Namun, kondisi Pattehschap akan terus dipantau secara cermat dan akan dievaluasi kembali dalam waktu yang layak.

Pasal 3

Keputusan ini diberitahukan kepada Residen Banyumas dan berlaku segera.

Ditetapkan di Batavia, 22 April 1835.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

Jean Chrétien Baud

Maka keputusan resmi pemerintah yang dikeluarkan dibawah Gubernur Jenderal Jean Chretien Baud, pada tanggal 22 April 1835 No. 2, menyatakan:

Permintaan tersebut DITOLAK.

Status istimewa Dayaluhur tetap dipertahankan.

Para pejabat di Batavia menilai bahwa beban tambahan kepada Dayaluhur, dalam kondisi ekonomi mereka yang lemah, hanya akan menimbulkan kehancuran sosial.

Bagi Patih Krama Yuda dan rakyat Dayaluhur, keputusan itu adalah perpanjangan nafas.

Mereka boleh bertani tanpa takut.

Mereka boleh tetap menjaga harga diri yang sempat dipulihkan oleh keputusan lama Van den Bosch.

Tetapi di luar Dayaluhur, kegelisahan semakin tumbuh.

Penyelundupan hasil bumi, ketidakpuasan, laporan-laporan miring terhadap Patih Dayaluhur — semua itu mulai mengisi berkas-berkas yang menumpuk di meja residen Banyumas.

BATAVIA, AKHIR 1837

Laporan demi laporan tentang "kekacauan" di wilayah Banyumas memenuhi meja-meja pejabat di Batavia.

Kecurigaan soal penyelundupan, ketidakpuasan distrik tetangga, tekanan dari residen-residen baru — semua menumpuk tanpa suara yang membela Dayaluhur.

Tetapi ada yang berbeda dari masa sebelumnya.

Tahun-tahun telah berlalu sejak Johannes van den Bosch meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1834.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda perlahan berubah arah:

Lebih keras,

Lebih seragam,

Kurang memberi ruang untuk pengecualian-pengecualian pribumi seperti yang pernah diberikan kepada Dayaluhur.

Para pejabat yang dulu bekerja di bawah perlindungan kebijakan Van Den Bosch pun banyak yang berganti.

Orang-orang yang dulu memahami kesulitan Dayaluhur, yang pernah melihat langsung penderitaan dan kejujuran rakyat gunung itu, satu per satu menghilang dari struktur pemerintahan.

Kini, Dayaluhur hanya sebuah nama kecil di antara banyak nama lain yang dituntut untuk "diseragamkan".

Dalam suasana baru yang keras itu, fitnah dan kecemburuan terhadap Dayaluhur tidak perlu lagi bukti kuat.

Cukup dengan opini, cukup dengan angka produksi yang dianggap "tidak wajar", keputusan untuk mencabut keistimewaan itu bisa diteken — tanpa perlu banyak debat.

Keputusan Pencabutan Resmi: Besluit 11 Januari 1838.

Pada 11 Januari 1838, dengan Resolusi Nomor 1599, pemerintah Hindia Belanda dibawah Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Eerens, mengeluarkan keputusan:

Mencabut keistimewaan Pattehschap Dayaluhur,

Menghentikan semua pengecualian terhadap sistem tanam paksa.

Keputusan Pencabutan Resmi: Besluit 11 Januari 1838

Pada tanggal 11 Januari 1838, Pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Eerens, setelah mempertimbangkan laporan-laporan terbaru dari Karesidenan Banyumas serta desakan yang terus meningkat dari para pejabat kolonial, mengeluarkan sebuah Resolusi No. 1599.

Melalui resolusi ini, pemerintah memutuskan:

Mencabut seluruh bentuk keistimewaan yang selama ini dinikmati oleh Pattehschap Dayaluhur,

Menghentikan semua pengecualian dari penerapan sistem cultuurstelsel (tanam paksa) maupun pengaturan pajak istimewa,

Mewajibkan Dayaluhur untuk mengikuti sistem Landrente (pajak tanah) secara penuh,

sebagaimana berlaku bagi wilayah lain di Karesidenan Banyumas dan seluruh Pulau Jawa pada umumnya.

Keputusan ini menandai berakhirnya masa-masa khusus Dayaluhur yang sejak tahun 1831 diperlakukan dengan pengecualian karena kondisi kemiskinan pasca perang dan bencana bajak laut.

Dengan pencabutan tersebut, rakyat Dayaluhur untuk pertama kalinya disatukan dalam kerangka umum pemerintahan kolonial Hindia tanpa perlakuan istimewa.

Teks Resolusi Resmi

Resolutie van den Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën

Gedaan te Batavia, den 11den Januarij 1838, No. 1599

Gezien:

De voordracht van den Resident van Banjoemas omtrent de toestand van het Pattehschap Dajaloehoer;

De rapporten betreffende de uitvoering van het cultuurstelsel in de omliggende afdeelingen;

Overwegende:

Dat het Pattehschap Dajaloehoer sedert jaren een bijzondere status heeft genoten op grond van vroegere bijzondere omstandigheden;

Dat deze omstandigheden thans niet langer aanwezig worden geacht in een mate die verdere afwijking van het algemene bestuursstelsel rechtvaardigt;

Besluit:

Artikel 1

De bijzondere status en alle daaraan verbonden uitzonderingen, verleend aan het Pattehschap Dajaloehoer, worden ingetrokken.

Artikel 2

Het Pattehschap Dajaloehoer wordt onderworpen aan het algemeen geldende stelsel van Landrente, overeenkomstig de regelingen van de Residentie Banjoemas en Java in het algemeen.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van het lopende jaar.

Gedaan te Batavia, den 11den Januarij 1838.

De Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën,

D.J. de Eerens

Terjemahan Bahasa Indonesia

Resolusi Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Ditetapkan di Batavia, 11 Januari 1838, No. 1599

Mengingat:

Usulan dari Residen Banyumas mengenai keadaan Pattehschap Dayaluhur;

Laporan-laporan tentang pelaksanaan sistem tanam paksa di wilayah sekitarnya;

Mempertimbangkan:

Bahwa Pattehschap Dayaluhur selama bertahun-tahun menikmati status istimewa berdasarkan keadaan luar bisaa di masa lalu;

Bahwa keadaan tersebut kini tidak lagi dianggap cukup untuk membenarkan penyimpangan dari sistem umum pemerintahan;

Memutuskan:

Pasal 1

Status istimewa dan seluruh pengecualian yang diberikan kepada Pattehschap Dayaluhur dicabut.

Pasal 2

Pattehschap Dayaluhur dikenakan sistem Landrente (pajak tanah) sebagaimana berlaku umum di Karesidenan Banyumas dan di Pulau Jawa.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak awal tahun berjalan.

Ditetapkan di Batavia, 11 Januari 1838.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

D.J. de Eerens

Dengan keluarnya resolusi ini, Dayaluhur resmi kehilangan perlakuan khususnya.

Reaksi di Dayaluhur

Madjenang, Awal 1838

Ketika salinan surat keputusan itu dibacakan di pendapa Madjenang,

Patih Krama Yuda hanya diam.

Di wajahnya tidak tampak amarah atau ratap, hanya kelelahan seorang lelaki yang memahami bahwa dunia luar tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan kecil yang diperjuangkannya.

Para wedana — dari Madjenang, Daya Luhur, Pegadingan, Jeroeklegi Nusa Kambangan — menunduk dalam-dalam.

Mereka tahu:

Ini bukan soal kesalahan mereka.

Ini soal angin kekuasaan yang berganti arah.

Dan dalam gumaman kecil di antara rakyat Dayaluhur, nama Van Den Bosch hidup kembali:

bukan sebagai penguasa, bukan sebagai orang Belanda semata, tetapi sebagai simbol sebuah masa —

masa ketika keadilan pernah singgah, walau sebentar, dan ketika suara rakyat kecil pernah didengar dari balik pegunungan yang jauh.

"Ngan waktos éta, urang kungsi dibéré kahormatan ku hiji Tuan anu terang rasa," bisik seorang lurah tua di bawah pohon aren.

(Hanya waktu itu, kita pernah diberi kehormatan oleh seorang Tuan yang mengerti rasa.)

Diceritakan,

Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal, Johannes van den Bosch kembali ke Negeri Belanda dan menempuh jalan baru: menjadi seorang politikus berpengaruh di Den Haag. Sebagai anggota penting dalam perdebatan kolonial, ia tetap mengikuti

dengan saksama perkembangan kebijakan di Hindia Belanda, terutama nasib daerah-daerah yang pernah ia perjuangkan.

Ketika kabar tentang pencabutan keistimewaan Dayaluhur sampai ke telinganya, Van den Bosch merasa terdorong untuk bertindak.

Bukan dengan pidato resmi di parlemen, bukan dengan tekanan politik terang-terangan,

melainkan dengan cara yang lebih pribadi:

sebuah surat — ditulis dengan tangan sendiri — kepada Dominique Jacques de Eerens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yang juga merupakan sahabat lamanya di lingkungan pemerintahan.

Surat itu sederhana, jujur, dan berbobot.

Beberapa pekan setelah surat itu tiba di Batavia, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah keputusan resmi:

Besluit 18 Maret 1838,

yang menetapkan ketentuan baru bagi Dayaluhur:

rakyatnya diberi kebebasan menjual lada dengan syarat membayar pajak khusus — sebuah kompromi halus antara prinsip kebebasan dan tuntutan keuangan negara.

1. Surat Pribadi Van den Bosch (Belanda)

’s-Gravenhage, den 10den Februarij 1838

Hooggeachte en doorluchtige vriend,

Sinds mijn vertrek uit Indië zijn de herinneringen aan dat verre land nooit werkelijk uit mijn geest geweken. Zeker, het leven hier in het koude

Haag is gevuld met plicht en redevoering, maar in de stilste uren keren mijn gedachten steeds terug naar de bergen van Dajaloehoer en de eenvoudige mensen die wij trachtten recht te doen.

Met grote droefheid vernam ik heden het besluit om de bijzondere status van het Pattehschap Dajaloehoer op te heffen en haar inwoners onder het gewone cultuurstelsel te brengen.

Ik kan niet nalaten U, uit de oprechtheid onzer oude vriendschap, mijn bezorgdheid kenbaar te maken.

Dajaloehoer, zo armzalig, zo fier, heeft zijn eigen weg gebaand onder de zwaarste omstandigheden.

Wij hebben destijds erkend dat zij niet gelijk konden worden behandeld aan de rijke vlakten van Java.

Niet uit zwakte, maar uit rechtvaardigheid hebben wij hun een bijzondere bescherming verleend.

Ik bid U, waarde vriend, te overwegen of de harde hand van uniforme maatregelen hier geen onherstelbare schade aanricht.

Mag men hen, die zich nog nauwelijks van hun oude wonden hebben hersteld, opnieuw onder een juk brengen dat hun wezen zal breken?

Indien men werkelijk een nieuw evenwicht wenst, zo stel ik voor een regeling te treffen waarbij hun trots behouden blijft: laat hen vrijelijk hun peper verhandelen, doch onder een redelijke bijdrage aan de schatkist, zodat zowel het Gouvernement als de bevolking haar eer behoudt.

Ik vertrouw erop dat gij deze overwegingen in Uw wijsheid zult verstaan, en dat Dajaloehoer niet vergeten wordt als slechts een voetnoot in de grote administratie van Indië.

Met de meeste hoogachting en vriendschap,

Uw toegenegen dienaar en vriend,

J. van den Bosch

Terjemahan Bahasa Indonesia

Den Haag, 10 Februari 1838

Sahabatku yang mulia dan luhur,

Sejak kepergianku dari Hindia, kenangan akan tanah yang jauh itu tak pernah benar-benar lenyap dari pikiranku. Tentu, hidup di Den Haag yang dingin ini penuh dengan tugas dan perdebatan, tetapi dalam saat-saat tersunyi, pikiranku selalu kembali ke pegunungan Dayaluhur dan rakyat sederhana yang dulu kita upayakan untuk mendapatkan keadilan.

Dengan kesedihan besar aku mendengar keputusan untuk mencabut status istimewa Pattehschap Dayaluhur dan membawa penduduknya di bawah sistem tanam paksa bisaa.

Aku tidak dapat menahan diri, demi ketulusan persahabatan lama kita, untuk menyampaikan kekhawatiranku kepada engkau.

Dayaluhur, yang miskin namun bangga, telah menempuh jalannya sendiri di tengah keadaan yang paling berat.

Dulu kita telah mengakui bahwa mereka tidak dapat diperlakukan sama seperti dataran subur di Jawa.

Bukan karena kelemahan, tetapi demi keadilan kita berikan mereka perlindungan khusus.

Aku mohon, sahabatku, pertimbangkanlah apakah tangan keras dari kebijakan seragam tidak akan membawa kerusakan yang tak dapat diperbaiki di sana.

Bolehkah kita menempatkan mereka, yang bahkan belum sembuh dari luka lamanya, di bawah beban baru yang dapat menghancurkan jiwa mereka?

Jika sungguh dikehendaki adanya keseimbangan baru, aku mengusulkan agar dibuatkan pengaturan di mana kehormatan mereka tetap terjaga:

biarkan mereka bebas memperdagangkan lada mereka, dengan ketentuan membayar kontribusi yang wajar kepada kas negara, sehingga baik Pemerintah maupun rakyat tetap memelihara kehormatannya.

Aku percaya bahwa engkau, dengan kebijaksanaanmu, akan memahami pertimbangan ini, dan Dayaluhur tidak akan dilupakan hanya sebagai catatan kaki dalam administrasi besar Hindia.

Dengan penghormatan dan persahabatan setinggi-tingginya,

Hamba dan sahabatmu yang setia,

J. van den Bosch

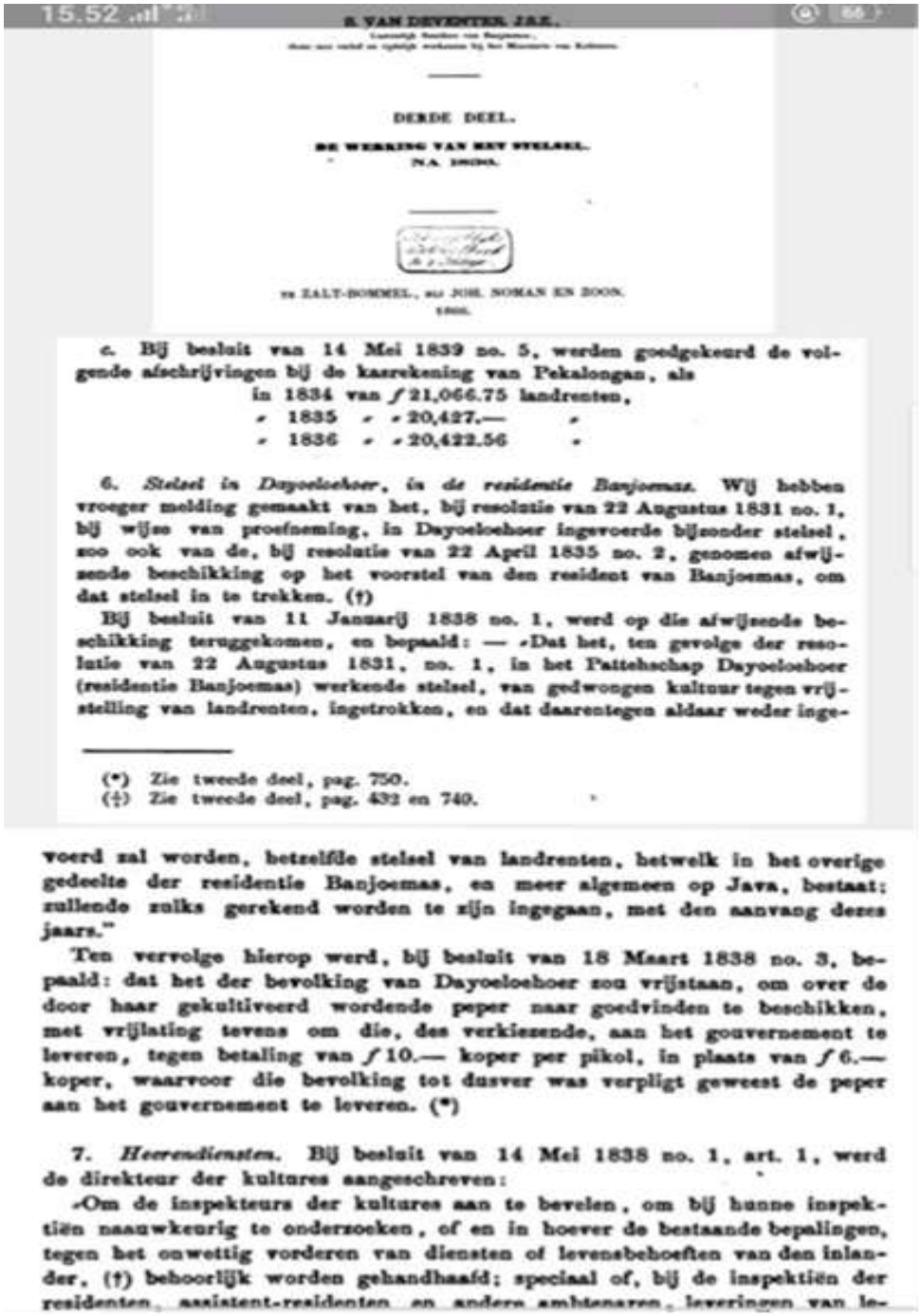

S. VAN DEVENTER, J.Z.E.

DERDE DEEL.

DE WERKING VAN HET STELSEL.

N.A. 1830.

TE ZALT-BOMMEL, BIJ JOH. NOMAN EN ZOON.

1866.

c. Bij besluit van 14 Mei 1839 no. 5, werden goedgekeurd de volgende afschrijvingen bij de kasrekening van Pekalongan, als

in 1834 van ƒ 21,066.75 landrenten,
" 1835 " " 20,427.— "
" 1836 " " 20,422.56 "

6. *Stelsel in Dayoeloehoer, in de residentie Banjoemas.* Wij hebben vroeger melding gemaakt van het, bij resolutie van 22 Augustus 1831 no. 1, bij wijze van proefneming, in Dayoeloehoer ingevoerde bijzonder stelsel, zoo ook van de, bij resolutie van 22 April 1835 no. 2, genomen afwijzende beschikking op het voorstel van den resident van Banjoemas, om dat stelsel in te trekken. (†)

Bij besluit van 11 Januarij 1838 no. 1, werd op die afwijzende beschikking teruggekomen, en bepaald: — "Dat het, ten gevolge der resolutie van 22 Augustus 1831, no. 1, in het Pattehschap Dayoeloehoer (residentie Banjoemas) werkende stelsel, van gedwongen kultuur tegen vrijstelling van landrenten, ingetrokken, en dat daarentegen aldaar weder ingevoerd zal worden, hetzelfde stelsel van landrenten, hetwelk in het overige gedeelte der residentie Banjoemas, en meer algemeen op Java, bestaat; zullende zulks gerekend worden te zijn ingegaan, met den aanvang dezes jaars."

(*) Zie tweede deel, pag. 750.
(†) Zie tweede deel, pag. 432 en 740.

Ten vervolge hierop werd, bij besluit van 18 Maart 1838 no. 3, bepaald: dat het der bevolking van Dayoeloehoer zou vrijstaan, om over de door haar gekultiveerd wordende peper naar goedvinden te beschikken, met vrijlating tevens om die, des verkiezende, aan het gouvernement te leveren, tegen betaling van ƒ 10.— koper per pikol, in plaats van ƒ 6.— koper, waarvoor die bevolking tot dusver was verpligt geweest de peper aan het gouvernement te leveren. (*)

7. *Heerendiensten.* Bij besluit van 14 Mei 1838 no. 1, art. 1, werd de direkteur der kultures aangeschreven:

"Om de inspekteurs der kultures aan te bevelen, om bij hunne inspektiën naauwkeurig te onderzoeken, of en in hoever de bestaande bepalingen, tegen het onwettig vorderen van diensten of levensbehoeften van den inlander, (†) behoorlijk worden gehandhaafd; speciaal of, bij de inspektiën der residenten, assistent-residenten en andere ambtenaren, leveringen van le-

Penerimaan Surat dari Van den Bosch

Ketika surat itu tiba di Batavia, tangan Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Eerens bergetar ringan saat membukanya. Ia mengenali tulisan tangan itu seketika — kuat, teratur, penuh wibawa. Nama Johannes van den Bosch bukan sekadar nama dalam daftar pejabat

lama; ia adalah fondasi dari kebijakan besar yang kini menopang negeri Hindia dan bahkan menghidupi Negeri Belanda sendiri.

De Eerens duduk lama di ruang kerjanya, surat itu terbuka di atas meja, matanya memandang jauh ke taman yang bermandi cahaya sore. Di dalam dirinya bergejolak rasa hormat yang dalam: Van den Bosch bukan hanya pendiri Cultuurstelsel — sistem yang membawa kekayaan besar ke kas kerajaan — melainkan juga sahabat, guru, dan panutan dalam seni mengelola negeri jajahan.

Bagi De Eerens, menimbang kata-kata Van den Bosch bukan sekadar sopan santun; itu adalah pengakuan terhadap jasa seorang perintis.

Ia tahu: dirinya hanyalah penerus — sekadar melanjutkan jalan yang sudah dirintis oleh tangan yang lebih berani, lebih penuh visi.

Maka, sebelum mengambil keputusan apapun atas nasib Dayaluhur, De Eerens memilih untuk berhenti sejenak.

Untuk mengingat siapa yang berbicara dari seberang laut itu:

seorang negarawan, seorang pembangun, dan — di atas semua itu — seorang sahabat.

Barulah sesudah malam panjang penuh renungan itu, De Eerens memerintahkan para stafnya untuk menyusun konsep keputusan baru, yang kelak akan diberi tanggal: 18 Maret 1838.

Sebuah kompromi halus lahir — tidak sepenuhnya membatalkan kebijakan keras, tetapi memberi Dayaluhur secercah ruang untuk bernafas, sebagaimana pernah dikehendaki oleh tangan yang mula-mula membangun negeri ini di atas ladang-ladang kecil rakyatnya.

2. Surat Keputusan (Besluit) 18 Maret 1838

Besluit van den Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën

Gedaan te Batavia, den 18den Maart 1838, No. 3

Gezien:

De ontvangen correspondentie betreffende den toestand van het Pattehschap Dajaloehoer;

Het verzoekschrift ter zake van de voormalige Gouverneur-Generaal Van den Bosch;

De wenselijkheid om de economische belangen van het Gouvernement en het welzijn der bevolking te verzoenen;

Overwegende:

Dat het Pattehschap Dajaloehoer sedert lang een bijzondere behandeling heeft genoten;

Dat de opheffing van die status reeds is uitgevoerd, doch dat nadere voorziening ten aanzien van de teelt en verkoop van peper noodzakelijk is;

Besluit:

Artikel 1

De inwoners van het Pattehschap Dajaloehoer worden toegestaan hun peper zelfstandig te verhandelen, zonder verplichte levering aan het Gouvernement.

Artikel 2

Op de verkoop van peper zal een vaste heffing van ƒ10 (tien gulden) koper per pikol worden toegepast, ter vervanging van de vroegere verplichte verkoop tegen ƒ6.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op den dag der afkondiging en blijft van kracht totdat een nieuw besluit wordt genomen.

Gedaan te Batavia, den 18den Maart 1838.

De Gouverneur-Generaal der Nederlandsch-Indische Koloniën,

D.J. de Eerens

Terjemahan Bahasa Indonesia

Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Ditetapkan di Batavia, 18 Maret 1838, No. 3

Mengingat:

Surat-menyurat yang diterima mengenai keadaan Pattehschap Dayaluhur;

Permohonan dari mantan Gubernur Jenderal Van den Bosch;

Keinginan untuk mendamaikan kepentingan ekonomi Pemerintah dan kesejahteraan penduduk;

Mempertimbangkan:

Bahwa Pattehschap Dayaluhur sejak lama menikmati perlakuan istimewa;

Bahwa pencabutan status tersebut telah dilaksanakan, namun perlu pengaturan tambahan terkait budidaya dan penjualan lada;

Memutuskan:

Pasal 1

Penduduk Pattehschap Dayaluhur diizinkan untuk memperdagangkan lada mereka secara mandiri, tanpa kewajiban menyerahkan kepada Pemerintah.

Pasal 2

Atas penjualan lada akan dikenakan pungutan tetap sebesar ƒ10 (sepuluh gulden) uang tembaga per pikol, menggantikan harga penyerahan wajib sebelumnya sebesar ƒ6.

Pasal 3

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal pengumuman dan tetap berlaku sampai ada keputusan baru.

Ditetapkan di Batavia, 18 Maret 1838.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

D.J. de Eerens

CILACAP, AKHIR 1847

Dua dekade setelah Johannes van den Bosch menginjakkan kakinya di Madjenang untuk pertama kalinya, proyek besar yang dahulu hanya berupa peta kasar dan impian kasar kini menjadi nyata.

Di pesisir selatan, di muara Sungai Donan yang dulu hanya rawa-rawa dan tanah berpasir, sebuah pelabuhan baru berdiri: Pelabuhan Tjilatjap.

Benteng-benteng telah didirikan, bajak laut yang dahulu menguasai perairan itu diusir, desa-desa tempat mereka bersembunyi dibakar habis.

"De roovers werden verjaagd en hunnedorpen verbrand," tulis laporan resmi pemerintah Belanda.

(Bajak laut diusir, dan kampung-kampung persembunyian mereka dibakar.)

Sepanjang Kali Djoso — kanal yang digali dari pedalaman ke muara — hasil bumi dari pegunungan Banyumas diangkut, dimuat ke dalam kapal-kapal kecil yang sejak beberapa tahun terakhir mulai menemukan tempat berlabuh yang aman di pantai ini.

Pada tanggal 28 November 1847, dengan keputusan resmi Gubernur Jenderal,Jan Jacob Rochussen.

Pelabuhan Tjilatjap dibuka sebagai pelabuhan perdagangan bebas —

Demi menerapkan ketentuan hukum pelabuhan dari Publicatie 31 Desember 1825.

Gudang-gudang besar untuk kopi, beras, dan lada didirikan di sepanjang dermaga.

Zoutverkoop (penjualan garam) dan pakhuis (gudang umum) menjadi pusat denyut ekonomi baru di selatan.

Perintah Pemindahan Ibu Kota

Tidak lama setelah peresmian pelabuhan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan instruksi:

Pusat pemerintahan Kabupaten Dayaluhur — yang selama ini berada di Madjenang — harus dipindahkan ke Cilacap.

Lebih dekat ke pelabuhan,

Lebih strategis untuk perdagangan,

Lebih mudah dikontrol dari Batavia melalui jalur laut.

Surat perintah resmi turun ke tangan Patih Krama Yuda.

Namun, reaksi Patih Krama Yuda mengejutkan para pejabat Belanda:

Ia menolak.

Bukan karena alasan politik.

Bukan karena rasa memberontak.

Tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam: kepercayaan tua yang hidup di antara rakyat gunung.

Bagi orang-orang Dayaluhur, tanah Cilacap — rawa-rawa asin dan sungai-sungai hitam —

adalah tanah yang angker.

Tempat roh-roh gentayangan,

tempat buangan, tempat yang bukan untuk memulai hidup, melainkan untuk mengakhiri perjalanan.

Patih Krama Yuda, sebagai pemimpin rakyatnya, tidak tega membawa seluruh jiwa Kabupaten Dayaluhur ke tanah yang mereka takuti.

Akhir Jabatan Patih Krama Yuda

Aan den Weledelgeboren Heer,

de Resident van de Residentie Banjoemas.

Madjenang, de ..... 1847.

Weledelgeboren Heer,

Met gevoelens van diepen eerbied en onderdanigheid, neem ik de vrijheid Uwe Weledelheid te berichten, dat ik, Patih Krama Yuda van het Pattehschap Dajaloehoer mij genoodzaakt zie mijn ambt neder te leggen.

Na de gerespecteerde bevelen te hebben ontvangen betreffende de verplaatsing van het bestuurscentrum naar de nieuwe havenstad Tjilatjap, heb ik met alle ernst en bezinning overwogen, doch meen ik, uit persoonlijke overtuiging en uit achting voor de gebruiken en gevoelens der bevolking, niet de geschikte persoon te zijn om deze belangrijke overgang te begeleiden.

Ik acht het in het belang van het Gouvernement en de bevolking zelf, dat een andere bekwame persoon, die de nieuwe richting met volle overtuiging kan steunen, mijn plaats inneemt.

Derhalve verzoek ik met ootmoedige onderwerping Uwe Weledelheid, mij eervol ontslag uit mijn ambt te verlenen, op een tijdstip dat Uwe Weledelheid passend acht.

Met de verzekering van mijn voortdurende trouw en dankbaarheid voor het vertrouwen dat mij gedurende vele jaren is geschonken, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting, Uwe Weledelheid's dienstwillige en onderdanige dienaar,

Krama Yuda

Patih van Dajaloehoer

Terjemahan ke Bahasa Indonesia:

Kepada Yang Mulia Tuan Residen Karesidenan Banyumas,

Madjenang, tanggal 1847

Yang Mulia Tuan,

Dengan rasa hormat dan penuh ketundukan, saya mengambil kebebasan untuk memberitahukan kepada Yang Mulia, bahwa saya, Patih Krama Yuda dari Pattehschap Dajaloehoer, merasa terpaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan saya.

Setelah menerima perintah mulia tentang pemindahan pusat pemerintahan ke kota pelabuhan baru Tjilatjap,saya telah mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh,namun saya merasa, atas keyakinan pribadi dan atas penghormatan terhadap adat istiadat serta perasaan rakyat,bahwa saya bukan orang yang tepat untuk memimpin perubahan penting tersebut.

Saya menilai demi kebaikan Pemerintah dan rakyat itu sendiri, sebaiknya jabatan ini dipegang oleh sosok lain yang mampu sepenuhnya mendukung arah baru ini.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati saya memohon kepada Yang Mulia, untuk berkenan memberikan kepada saya pemberhentian dengan hormat dari jabatan ini, pada saat yang Yang Mulia anggap layak.

Dengan menyampaikan jaminan atas kesetiaan dan rasa terima kasih saya yang tiada henti, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama bertahun-tahun, saya tetap,

Dengan hormat setinggi-tingginya,

Hamba Yang Setia dan Tunduk,

Krama Yuda

Patih Dayaluhur

Penolakannya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Madjenang ke Cilacap dianggap sebagai ketidakpatuhan administratif.

Maka, melalui surat resmi dari Batavia, Patih Krama Yuda dipensiunkan secara terhormat.

Namun pergantian kepemimpinan di Dayaluhur — yang mulai beralih nama menjadi Cilacap — tidak berlangsung sepenuhnya lancar.

Pemerintah Hindia Belanda menunjuk keponakan beliau,

Kerama Reja,

untuk melanjutkan tugas pemerintahan.

Tetapi ada satu persoalan:

Kerama Reja bukan berasal dari darah bangsawan murni.

Dalam adat pemerintahan pada masa itu, seorang Patih — apalagi yang memimpin daerah strategis seperti pelabuhan baru —

harus memiliki status kebangsawanan yang diakui secara resmi, sehingga keputusan dan wewenangnya di mata rakyat maupun kerajaan Jawa tetap sah.

Karena itu, sebelum pelantikan resminya, pemerintah mengajukan permohonan kepada Sunan Surakarta untuk memberikan gelar kebangsawanan kepada Kerama Reja.

Melalui proses yang berjalan sesuai tata krama keraton, Kerama Reja akhirnya dianugerahi gelar Raden Mas oleh Sultan Surakarta.

Dengan gelar tersebut, ia berhak memegang jabatan Patih secara penuh dalam struktur pemerintahan kolonial.

Dengan nama barunya, Raden Mas Kerama Reja memulai tugasnya:

Pembangunan Awal Kota Cilacap pada Era Kerama Reja

Sebelum Cilacap menjelma menjadi pusat pemerintahan dan pelabuhan utama di pesisir selatan, kota ini lahir dari keringat dan kerja sama rakyat Dayaluhur pada masa pemerintahan Kerama Reja.

Pada masa itu, seluruh kekuatan rakyat Dayaluhur dihimpun dalam satu tekad: membangun sebuah kota baru yang kelak menjadi pusat pemerintahan dan benteng pertahanan penting bagi wilayah selatan.

Dari desa-desa di pedalaman, mereka bergotong-royong — dengan tenaga, dengan kayu, dengan keahlian — membawa kehidupan ke tanah pesisir yang masih sepi.

Kayu-kayu wujati (jati tua) yang gagah, ditebang dari hutan-hutan dalam, kemudian dihanyutkan melewati sungai-sungai besar yang waktu itu menjadi nadi utama perhubungan di Dayaluhur.

Sungai Citanduy, Sungai Cimeneng, Sungai Cibereum, dan aliran-aliran kecil lainnya, menjadi jalur emas yang mengantarkan balok-balok besar kayu jati itu menuju Cilacap.

Arus Kayu dan Bambu dari Pegunungan Dayaluhur ke Cilacap

Pada waktu itu,

ketika Cilacap mulai tumbuh sebagai kota pelabuhan dan pusat pemerintahan baru, rakyat Dayaluhur memikul sebuah tugas besar:

mengirimkan kayu dan bambu dari pegunungan untuk membangun pondasi kota itu.

Dari desa-desa yang tersebar di lereng-lereng gunung, rakyat berkumpul.

Kayu-kayu wujati yang kokoh, bersama bambu-bambu panjang,

ditebang dan disiapkan untuk perjalanan panjang menuju Cilacap.

Sungai-sungai besar menjadi jalur hidup mereka:

Sungai Citanduy,

Sungai Ciberem,

Sungai Cikawung.

Melalui aliran deras itu, batang-batang kayu dan rakitan bambu dihanyutkan, didorong oleh kekuatan arus dan diiringi pengawasan ketat dari para pemuda desa.

Kayu dan bambu itu bukan dikirim secara bebas,

melainkan sebagai setoran wajib dari setiap kampung kepada pemerintah lokal.

Sebagai tanda pengakuan bahwa setoran mereka telah sampai ke Cilacap, sebuah cap resmi diberikan — sejenis tanda bukti zaman dahulu, yang diukirkan atau dicapkan di atas batang kayu besar.

Perjalanan dari pegunungan Dayaluhur hingga ke pelabuhan Cilacap bukanlah perkara ringan.

Dalam kondisi aliran sungai yang berubah-ubah, sering kali rakit-rakit kayu itu membutuhkan waktu hingga dua minggu untuk sampai ke tujuan.

Sesampainya di Cilacap, kayu-kayu itu diangkat dan dikeringkan,

lalu dipakai untuk membangun:

Pendopo kabupaten,

Kantor-kantor pemerintah,

Rumah Kontrolir dan regen,

Pelabuhan,

Benteng pertahanan,

Dan bangunan-bangunan penting lain yang menandai lahirnya kota Cilacap sebagai pusat pemerintahan baru.

Semua dilakukan dengan tangan manusia,

tanpa mesin, tanpa jalan raya — hanya dengan kesabaran, tenaga, dan semangat gotong-royong.

Demikianlah, tidak ada kayu yang "terbang" dari pegunungan ke laut dengan kesaktian, sebagaimana cerita-cerita rakyat kadang melebihkan. Yang ada hanyalah kerja keras tanpa henti, di bawah panas dan hujan, demi menegakkan satu kota baru untuk masa depan anak cucu mereka.

Di pantai yang berpasir hitam itu, para leluhur mendirikan:

Pendopo pemerintahan,

Bangunan-bangunan kantor dan perumahan pejabat,

Benteng pertahanan menghadap laut lepas,

Dan pelabuhan sederhana yang kelak menjadi urat nadi perdagangan.

Tidak ada mesin berat, tidak ada teknologi modern — hanya tangan-tangan rakyat, hanya ikatan gotong-royong, dan keyakinan bahwa masa depan lahir dari kerja keras bersama.

Semangat itu adalah semangat Orang Dayaluhur:

membangun bukan karena perintah, melainkan karena kehendak untuk meletakkan batu pertama bagi anak cucu mereka kelak.

Maka, berdirilah Cilacap — bukan sekadar sebuah kota, tetapi warisan abadi dari ketekunan dan kebersatuan rakyat Dayaluhur di bawah naungan pemerintahan Patih Kerama Reja.

Perpindahan Pusat Pemerintahan ke Cilacap

Raden Mas Kerama Reja memulai tugas besarnya dengan satu langkah bersejarah:

memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Dayaluhur dari dataran tinggi Madjenang ke kawasan pesisir Cilacap.

Di bawah kepemimpinannya, dilakukan penyusunan ulang atas sistem pemerintahan, menyesuaikan dengan kebutuhan sebuah kota pelabuhan yang baru mulai tumbuh — sebuah kota yang kelak menjadi gerbang utama ke samudera dan titik simpul perdagangan selatan.

Raden Mas Kerama Reja menjadi Patih pertama yang secara resmi memerintah dari Cilacap, bukan lagi dari pegunungan dingin Dayaluhur.

Dengan langkah itu, lahirlah sebuah kabupaten baru —

sebuah Kabupaten Dayaluhur yang berpusat di Cilacap, membuka babak baru dalam sejarah pemerintahan daerah ini:

dari perbukitan terpencil menuju dunia maritim yang lebih luas dan dinamis.

Sayangnya, perlahan, nama "Dayaluhur" mulai tenggelam menjadi kenangan dalam catatan sejarah.

Kota Cilacap 1861

Wafatnya Patih Krama Yuda

14 Desember 1848 —

hanya setahun lebih setelah melihat perubahan yang tak dapat ia hentikan,Patih Krama Yuda meninggal dunia di Madjenang.

Di rumah tua yang dibangun di tanah tinggi, di antara hutan-hutan bambu dan pohon aren yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya.

Ia meninggal dalam sunyi.

Tanpa tahta.

Tapi dengan harga diri utuh — sebagai lelaki yang memilih untuk tidak mengkhianati tanah leluhurnya, bahkan ketika dunia di sekelilingnya memilih jalannya sendiri.

MADJENANG, AKHIR 1848

Di belakang kantor Wedana Madjenang yang tua, di bawah pohon-pohon besar yang meranggas di musim kemarau, sebuah makam batu sederhana tersembunyi — kuburan Patih Krama Yuda.

Tak ada nisan megah.

Tak ada plakat resmi.

Hanya tanah yang ditumbuhi ilalang liar, dan kadang-kadang bunga liar yang gugur di musim basah.

Di sanalah, seorang lelaki dari tanah tinggi itu beristirahat, jauh dari pelabuhan baru, jauh dari hiruk-pikuk perdagangan yang dahulu ia tolak dengan tenang.

Sementara itu, jauh dari Madjenang, dari Dayaluhur, di ruang-ruang pengadilan sejarah, nama Johannes van den Bosch perlahan berubah menjadi kutukan.

Dikenang dalam buku-buku sejarah, ia dikenang sebagai pencipta Tanam Paksa, sebagai lambang dari penindasan kolonial, sebagai

orang Belanda yang menyebabkan penderitaan berjuta-juta petani di Jawa.

Tetapi bagi orang Dayaluhur, cerita tentang Van den Bosch berbeda.

Di kaki-kaki gunung yang sunyi, di antara rumpun-rumpun bambu tua, orang tua bercerita dengan suara berbisik:

Tentang seorang Gubernur Jenderal yang datang bukan hanya untuk menghitung pohon nila dan kopi, Tapi yang mau duduk di pendapa sederhana, Mau mendengarkan suara Patih yang malu, Mau mengulurkan tangan ke rakyat kecil yang selama ini tak pernah dihitung.

Bagi Dayaluhur, Van den Bosch adalah orang luar yang, untuk sejenak, mengerti rasa malu, rasa harga diri, rasa manusia.

Namun sejarah tidak selalu memilih suara kecil.

Setelah Patih Krama Yuda wafat, dan setelah keponakannya, Raden Mas Krama Reja, membuka babak baru di Cilacap, perubahan besar mulai datang:

Pemerintah Hindia Belanda menunjuk bupati-bupati baru, Mereka bukan lagi keturunan Tradisi lama, Mereka orang berbeda dan jaringan baru.

Untuk mengisi kota-kota baru di sekitar pelabuhan, ribuan orang berbeda dibawa masuk.

Perlahan-lahan, bahasa, adat, dan darah Dayaluhur surut seperti air pasang yang tak pernah kembali.

Seratus tahun kemudian, orang Dayaluhur suara kecil dari seluruh penduduk Kabupaten Cilacap.

Nama "Dayaluhur" — yang dulu pernah disandingkan sejajar dengan Cilacap dalam dokumen resmi — hanya tersisa dalam ingatan beberapa orang tua.

Sampai sekitar tahun 1860, peta-peta resmi kadang-kadang masih mencatat: "Kabupaten Cilacap / Dayaluhur."

Tapi setelah itu, nama Dayaluhur perlahan lenyap, tinggal sebagai sebutir bayang-bayang samar dalam sejarah yang disusun oleh tangan-tangan lain.

Kisah Dayaluhur bukan kisah kekalahan.

Bukan kisah kelupaan.

Tapi kisah tentang suara kecil yang pernah berbicara, tentang kehormatan yang pernah bertahan, tentang sebuah tanah yang, meskipun ditulis kecil dalam buku-buku besar, pernah menggetarkan hati seorang Gubernur Jenderal, dan pernah mengajari dunia, sejenak, apa arti menghormati manusia kecil.

Namun Di tanah Dayaluhur, suara kecil itu tidak pernah benar-benar lenyap.

Karakter asli rakyat Dayaluhur adalah mengenang — bukan melupakan.

Mereka bukan bangsa yang mudah terpukau oleh keagungan yang baru, bukan pula bangsa yang mengubur masa lalu demi menyanjung masa kini.

Di setiap zaman, mereka memilih mengingat satu hal:

siapapun yang memerintah dengan kebaikan, siapapun yang mengabdikan diri bagi tanah ini dengan hati bersih, akan hidup abadi dalam kenangan mereka.

Tuan yang baik. Patih yang baik.

Nama-nama itu tidak perlu diukir dalam batu.

Mereka hidup dalam cerita yang dibisikkan dari ayah ke anak, dari ibu ke cucu, dari sepuh-sepuh pegunungan dalam setiap nafas yang mengalir di lereng-lereng dan sungai-sungai Dayaluhur.

Bagi rakyat Dayaluhur, pemerintahan yang adil hari ini tidak bisa berdiri di atas penghapusan masa lalu, tetapi berdiri di atas penghormatan terhadap siapa saja yang pernah menanam kebaikan di tanah ini.

Karena bagi mereka, suara kecil yang pernah berbicara dengan jujur, adalah suara yang pantas diingat selamanya.